



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
**UNIT KERJA** : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ITA RIMA RAHMAWATI**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **1000274**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **1.283.797.000**

1. Tanah Seluas 126 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 35.910.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 78.208.000
4. Tanah Seluas 95 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 44.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 218 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , Rp. 166.992.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 303 m2/265 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 358.687.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **220.000.000**

1. MOTOR, VESPA PRIMAVERA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, SUZUKI XL7 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **44.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	650.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.197.797.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.197.797.000

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.